

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Fenomena dinasti politik di Indonesia menjadi isu yang menarik perhatian media setelah munculnya wacana putra presiden Joko Widodo yaitu Gibran menjadi calon wakil presiden dari Calon presiden Prabowo Subianto. Dinasti politik dapat disebut sebagai sebuah wujud kontrol kekuasaan pada pemerintah dimana penguasa berupaya meletakkan keluarga, saudara, dan kerabat-kerabatnya pada jabatan strategis dengan tujuan untuk membangun suatu kerajaan politik yang terfokus pada garis keluarganya (Ahmalia et al., 2024a). Penempatan anggota keluarga dalam posisi strategis mempermudah penguasa untuk mengontrol dan mengendalikan segala sesuatu yang diperlukan untuk mempertahankan kekuasaan. Salah satu saluran bagi politisi untuk memberikan sumbangsih pengontrolan ini adalah melalui lembaga legislatif seperti DPR RI, DPRD Provinsi, kota, kabupaten, serta DPD. Lembaga-lembaga perwakilan ini dipilih secara legitimasi oleh rakyat melalui pemilihan umum.

Era reformasi yang diharapkan membawa perubahan justru menyuburkan dinasti politik, terutama setelah diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001 dan pemilihan kepala daerah secara langsung sejak 2005. Kelemahan partai politik dan regulasi yang lemah membuka ruang bagi dinasti politik untuk berkembang di berbagai jabatan pemerintahan. Hal ini memungkinkan keluarga-keluarga politik memperpanjang kekuasaan mereka di berbagai wilayah, menciptakan "raja-raja

kecil" seperti dinasti Atut di Banten, dinasti Fuad di Bangkalan, dinasti Kutai Kartanegara, dinasti Cimahi, dinasti Klaten, dan dinasti Banyuasin (Heriyanto, 2022).

Keluarga Soekarno, presiden pertama Indonesia, merupakan salah satu contoh awal dinasti politik. Anak-anaknya, seperti Megawati Soekarnoputri, Sukmawati, Rachmawati, Guruh Soekarnoputra, dan cucu-cucunya seperti Puan Maharani serta Prananda Prabowo, semuanya terjun ke dunia politik (Suryatwan, 2020). Begitu pula dengan keluarga Soeharto, di mana anak-anaknya seperti Siti Hediati Hariyadi (Titiek) dan Hutomo Mandala Putra (Tommy) juga aktif dalam politik. Keluarga-keluarga presiden lainnya menunjukkan pola serupa, seperti keluarga Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dengan Yenny Wahid dan Abdul Muhaimin Iskandar, serta keluarga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Eddie Baskoro Yudhoyono (EBY), serta kerabat lainnya (Suryatwan, 2020).

Faktor utama yang mendorong terbentuknya dinasti politik adalah keinginan untuk mempertahankan kekuasaan serta melanjutkan program-program pemerintah yang belum selesai. Dinasti politik berakar pada hubungan darah dan keturunan, yang memungkinkan kekuasaan diwariskan dalam lingkup keluarga untuk menjaga keberlanjutannya. Pewarisan kekuasaan ini biasanya terjadi melalui posisi politik yang terbuka. Jika praktik dinasti politik terus berlangsung, hal ini dapat menghambat kemunculan kader-kader politik yang berkualitas serta menutup peluang bagi individu lain untuk berkontribusi melalui kemampuan dan kapasitas

mereka. Selain itu, dinasti politik sering kali didorong oleh upaya memanfaatkan popularitas sebagai sarana untuk meraih kemenangan, sehingga kader-kader dari keluarga tersebut dapat menduduki jabatan pemerintahan, sekaligus memperkuat nama partai politik yang menaunginya. Fenomena dinasti politik tidak hanya ditemukan di negara berkembang, tetapi juga di negara maju. Namun, praktik ini memiliki perbedaan mencolok dalam budaya politik antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Di Indonesia, dinasti politik cenderung dipengaruhi oleh tradisi nilai-nilai lama, seperti feodalisme, patrimonialisme, atau pola hubungan patron-klien. Hal ini menciptakan struktur kekuasaan yang cabang-cabangnya didominasi oleh kelompok tertentu. Dinasti politik di Indonesia masih bersifat top-down, dan partai politik di sini memerlukan pengembangan lebih lanjut dalam membangun sistem kaderisasi yang baik agar dapat menghasilkan tokoh-tokoh politik yang unggul. Sebaliknya, di Amerika Serikat, dinasti politik memiliki pola yang lebih matang dengan pendekatan bottom-up dan sistem kaderisasi yang lebih terstruktur. Dalam konteks ini, etika demokrasi modern diintegrasikan melalui persiapan pendidikan politik sejak dini, sehingga anggota keluarga yang terlibat dalam politik tumbuh dengan latar belakang pendidikan dan pemahaman politik yang memadai.

Isu dinasti politik kian menguat ketika Presiden Joko Widodo juga tak lepas dari fenomena ini, dengan anaknya, Gibran Rakabuming Raka, terpilih sebagai Wali Kota Solo, dan menantunya, Bobby Nasution, sebagai Wali Kota Medan. Dalam kontestasi Pemilu 2024, Gibran Rakabuming Raka maju dalam Pemilu 2024

menjadi salah satu calon wakil presiden. Terpilihnya Gibran sebagai calon wakil presiden mendapat banyak respon negatif dari beberapa pihak mengingat proses terpilihnya Gibran melibatkan Mahkamah Konstitusi dengan pengabulannya Gugatan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diajukan juga terhadap Pasal 169 huruf q dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang saat ini menetapkan syarat bahwa calon harus berusia minimal 40 tahun atau pernah/menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk jabatan kepala daerah. Kejadian ini tidak hanya menyoroti Gibran, melainkan Anwar Usman sebagai ketua Mahkamah Konstitusi yang merupakan ipar dari presiden Joko Widodo. Dari dokumenter yang dirilis oleh WatchDoc pada 25 November 2024, disebutkan bahwa 294 daerah terpapar dinasti politik dari 545 daerah pemilihan. Hal ini telah menjadi ancaman bagi dinamika politik di Indonesia, dengan catatan bahwa dinasti politik telah membawa dampak buruk bagi kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dinasti politik tidak hanya membawa dampak pada korupsi hukum, akan tetapi korupsi kebijakan, serta hilangnya kontrol tata daerah yang baik untuk masyarakat. Fenomena ini membuat pro dan kontra pada media yang bertanggungjawab untuk menginformasikan isu ini pada publik.

Beberapa media mungkin menempatkan diri mereka sebagai pihak yang kontra dengan dinasti politik, namun terdapat beberapa media juga yang terlihat tidak mempermasalahkan tentang keberadaan dinasti politik. Penelitian milik Aziz dan Wahid (2021) membahas tentang bagaimana media online kompas.com dan

okezone dalam membingkai berita tentang dinasti politik dalam Pilkada 2020. Temuan dari penelitian itu adalah pemberitaan Kompas.com secara jelas mengutamakan berita yang kontra dengan dinasti politik yang ada di Indonesia, dalam konteks ini Pilkada 2020. Hal kebalikannya, ditemukan dalam pemberitaan Okezone.com. Dalam pemberitaan Okezone.com, media tersebut secara jelas tidak mempermasalahkan adanya dinasti politik dalam Pilkada 2020 (Aziz & Wahid, 2021).

Penelitian lainnya tentang dinasti politik juga dilakukan oleh Rahman dan Nurhadi (2024) mengenai konstruksi isu dinasti politik Joko Widodo dalam tayangan youtube opini Tempo. Dalam penelitian itu, ditemukan opini dalam wacana yang merujuk pada Joko Widodo membutuhkan seorang presiden yang dapat melindungi dia dari konsekuensi hukum (Rahman & Nurhadi, 2024).

Dinasti politik telah menjadi sorotan media, baik domestik maupun mancanegara. Berbagai media massa luar negeri memberikan perhatian penuh pada Pemilu Indonesia. Media Singapura, Chanel News Asia, dan The Strait Times membuat laporan langsung tentang fenomena ini. Channel News Asia menyajikannya di laman televisinya, sedangkan The Strait Times menyajikan laporan langsung di laman webnya. Keduanya menyoroti kondisi politik Indonesia yang sama dengan Filipina, hal ini mengacu pada maraknya praktik dinasti politik. Remotivi membuat sebuah kajian tentang bagaimana dinasti politik dikemas oleh media di Indonesia. Lutfhi (2024) menyebut faktor-faktor lain juga berperan dalam kesuksesan keluarga dinasti politik, namun hasil penelusuran Remotivi

menunjukkan bahwa media memainkan peran penting dalam membentuk citra keluarga politik. Media, dengan kecenderungannya untuk meliput kehidupan pribadi tokoh politik beserta keluarganya, secara tidak langsung, yaitu membangun profil Gibran Rakabuming dan mempromosikan keluarga Joko Widodo sebagai sebuah brand (Luthfi, 2024).

Penelusuran Remotivi mengungkapkan bahwa profil Gibran sudah mulai dibentuk di media jauh sebelum ia menjadi kandidat wali kota Surakarta. Kehidupan pribadi Gibran, mirip dengan seorang selebriti, sering kali menjadi sorotan. Mulai dari pernikahannya dengan Selvi Ananda, kelahiran serta ulang tahun anak pertama mereka, hingga bisnis dan aktivitas media sosialnya, semuanya mendapat perhatian media secara luas.

Gibran baru ditemukan dalam artikel berita pada bulan April 2014, ketika Joko Widodo baru saja dicalonkan oleh PDIP sebagai calon presiden untuk pemilu 2014. Bisnis catering Gibran, Chilli Pari, yang berdiri sejak tahun 2010, baru mulai mendapat perhatian media pada November 2014. Sorotan media terhadap Gibran sebagian besar dipengaruhi oleh statusnya sebagai anggota keluarga dari tokoh politik penting saat itu.

Selain itu, media tidak hanya meliput Gibran secara terpisah tetapi juga secara aktif memasarkan dan memperkenalkannya sebagai bagian dari brand keluarga Joko Widodo. Media secara konsisten mengaitkan Gibran dengan Joko Widodo dalam liputannya. Dari 213 artikel berita yang dikumpulkan, hanya 6 artikel yang tidak menyebutkan Gibran dalam konteks keluarga Joko Widodo. Nama Gibran

sering kali muncul bersama keterangan “putra sulung Joko Widodo/Iriana” dan dalam berita-berita yang melibatkan aktivitas keluarga Joko Widodo, seperti saat mereka menghabiskan akhir pekan bersama atau saat Gibran berbicara dalam pernikahan adiknya (Luthfi, 2024).

Selain itu, media juga mengaitkan sifat-sifat yang menjadi ciri khas brand politik Joko Widodo pada Gibran. Menurut Rakhmani dan Saraswati (2021), karakteristik yang menonjol dari Joko Widodo adalah ia dikenal sebagai warga biasa yang sukses berpolitik tanpa campur tangan elite Orde Baru, dan ia menjunjung pluralisme dan keberagaman. Pemberitaan media sebelum Gibran dicalonkan sebagai wali kota Surakarta menggambarkan Gibran sebagai sosok warga biasa, pengusaha, dan pekerja keras yang tidak memiliki ambisi kekuasaan (Rakhmani & Saraswati, 2021). Berita mengenai cuitan Gibran yang menyatakan tidak akan terlibat dalam kampanye ayahnya pada pemilu 2019 serta pujian atas sikapnya yang tidak memanfaatkan posisinya untuk keuntungan pribadi, juga sering muncul. Media juga menyoroti bagaimana Gibran menyambut dengan hangat keluarga Yudhoyono, yang merupakan lawan politik Joko Widodo, menunjukkan pluralisme politik.

Dengan demikian, meskipun pengalaman politik Gibran relatif minim, media telah membantu memperkuat citra dan brand Joko Widodo sebagai modal penting dalam pencalonan Gibran sebagai wali kota dan wakil presiden. Peran media dalam membangun dan memperkuat modal tersebut sangat signifikan.

Budiyono (2016) menyoroti dua media yang memberitakan tentang Dinasti Politik. Penelitiannya menunjukkan bahwa Koran Tempo menyoroti citra negatif mengenai isu politik dinast, dengan menekankan pentingnya respon dari semua pihak untuk melihat bagaimana prospek kedepannya lagi sebagai kehidupan demokrasi di Indonesia dengan mendorong penolakan terhadap politik dinasti. Sikap ini mencerminkan prinsip independensi, kontrol sosial, dan pandangan berita sebagai ramalan. Di sisi lain, Harian Kompas cenderung mengkonstruksi realitas isu dinasti politik yang didasarkan pada penempatan teks, dan pengutipan sumber.

Media bukan wahana yang netral. Kehadiran media tidak selalu dapat diperlakukan dengan pola relasi yang biasa. Dalam proses produksi, media tidak dapat dilepaskan dari ideologi. Ideologi yang digunakan media tidak terlepas dari konteks sosiokultural media yang bersangkutan.

The Jakarta Post sendiri adalah konsorsium yang dibentuk dari beberapa grup media pada 1983. Jusuf Wanandi mengajak beberapa nama-nama besar dari beberapa media yang besar, seperti Suara Karya milik Golkar, Kompas yang terafiliasi erat dengan nilai katolik, Sinar Harapan yang kuat dengan nilai kristen, serta majalah Tempo. Ide ini disetujui oleh Ali Moertopo yang kala itu adalah menteri penerangan. Akhirnya, izin publikasi The Jakarta Post terbit. Gabungan dari empat media ini adalah keahlian lobi yang dimiliki oleh Jusuf Wanandi seorang (Tarrant, 2008). Sejak awal pembentukan, The Jakarta Post telah mengincar gaya pemberitaan ala Amerika. Gaya ini dicapai dengan merekrut beberapa ekspatriat Amerika untuk bergabung dengan tim redaksinya. Gaya jurnalistik Amerika ini

tidak dilakukan dengan tanpa alasan. Saat puncak perang dingin, rezim Orde Baru yang anti-komunis tetap aman bagi The Jakarta Post. Masuknya perusahaan minyak Amerika Serikat yang sedang melakukan eksplorasi di seluruh kepulauan Indonesia, serta investasi asing Amerika telah digalakkan kembali menjadi alasan The Jakarta Post menggunakan gaya jurnalisme Amerika Serikat. Ketika bergantinya pemerintahan Soeharto ke B.J. Habibie, The Jakarta Post memiliki perlawanan permainan politik. Presiden B.J. Habibie berupaya melawan The Jakarta Post yang dianggap pro Soeharto dengan membeli koran The Indonesia Times, serta melawan CSIS yang merupakan afiliasi dari The Jakarta Post dengan membangun Center for Information and Development Studies (CIDES) (Mccargo, 2003).

Eriyanto (2002) mengemukakan bahwa media tidak beroperasi sebagai entitas yang netral dalam proses konstruksi realitas. Sebaliknya, media berfungsi sebagai instrumen ideologi yang secara aktif membentuk realitas melalui pemberitaan. Poin pertama yang mendukung argumen ini adalah peran media dalam mengkonstruksi realitas, bukan hanya menyampaikan informasi. Media memiliki ideologi yang berbeda-beda, yang dipengaruhi oleh pemiliknya serta kepentingan-kepentingan yang ada (Eriyanto, 2002). Ini berarti bahwa berita yang disajikan media tidak lepas dari pengaruh ideologi yang mendasarinya. Selain itu, proses framing, di mana media memilih dan menyusun informasi dengan cara tertentu, memberikan makna khusus pada berita. Dengan framing, media tidak hanya menyampaikan fakta-fakta,

tetapi juga mengarahkan interpretasi dan pemahaman publik terhadap peristiwa tertentu.

Selain faktor internal media, ada kekuatan eksternal yang turut membentuk kecenderungan media, seperti sumber berita, pengiklan, dan konsumen berita. Produksi berita sering kali melibatkan pertarungan antara pihak-pihak yang berkepentingan, di mana pihak dengan kekuatan kapital yang lebih besar memiliki peluang lebih besar untuk mendominasi proses tersebut. Media massa dapat berfungsi sebagai sarana penyebaran ideologi penguasa, alat legitimasi, dan kontrol wacana publik. Namun, media juga bisa menjadi alat resistensi terhadap kekuasaan, menunjukkan bahwa media tidaklah bebas dan independen sepenuhnya, melainkan terjalin dengan realitas sosial dan berbagai kepentingan yang ada. Dengan demikian, Eriyanto (2002) menegaskan bahwa media berperan sebagai instrumen ideologi yang aktif dalam mengkonstruksi dan mendefinisikan realitas melalui pemberitaan yang dipengaruhi oleh ideologi dan kepentingan yang kompleks.

The Jakarta Post menjadi satu-satunya media berbahasa Inggris yang telah melakukan peliputan tentang kehidupan politik dan pemilu sejak 1983. The Jakarta Post adalah media yang memiliki sirkulasi kecil, namun memiliki nilai jurnalisme yang sangat berkualitas dan memiliki pengaruh yang sangat tinggi (Mccargo, 2003). The Jakarta Post terkenal sebagai media berbahasa Inggris yang melawan cara bertutur layaknya orang Indonesia pada umumnya. Tarant (2008) menyebut bahwa gaya pemberitaan The Jakarta Post berbeda dengan koran di Indonesia pada umumnya. Gaya pemberitaan The Jakarta Post cenderung aktif dan juga

menggunakan kutipan langsung, berbeda dengan media di Indonesia pada umumnya yang cenderung pasif dan juga menggunakan parafrase dalam kutipannya, seperti yang dikutip Wanandi, yaitu “anda tidak dapat beromong kosong dengan bahasa Inggris seperti cara orang Jawa” (Tarrant, 2008). The Jakarta Post sendiri telah melewati beberapa krisis yang terjadi di Indonesia. Pada tahun-tahun awal publikasinya, The Jakarta Post mengalami kesulitan menarik pengiklan, sampai pada beberapa edisi terbit tanpa iklan. Namun, sirkulasinya meningkat drastis, dari 8.657 pada tahun 1983 menjadi 17.480 pada tahun 1988. Meskipun awalnya diharapkan bahwa koran ini akan mulai menghasilkan keuntungan dalam tiga tahun pertama, resesi awal 1980-an menyebabkan dana awal habis. Akhirnya, pada tahun 1985, koran ini mengambil pinjaman tanpa bunga dan menerima Rp. 700 juta dari pemiliknya. Setelah iklan meningkat, The Jakarta Post berhasil menghasilkan keuntungan pada tahun 1988 dan dianggap sebagai "salah satu surat kabar paling kredibel" di Indonesia (Tarrant, 2008).

Dahulu, The Jakarta Post dianggap menjadi sebuah media alternatif karena tidak memiliki pasar yang besar di kalangan domestik, melainkan dominasi pasar ada pada ekspatriat. Mereka menggunakan bahasa Inggris di mana negara Indonesia berbeda dari negara Asia Tenggara lainnya; dijajah oleh Inggris. Indonesia sendiri dijajah oleh Portugis dan Belanda, sehingga pembekalan bahasa Inggris menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia tidak sekuat masyarakat Asia Tenggara lainnya (Tarrant, 2008). Ini membuat The Jakarta Post menjadi media yang terasa asing bagi pembaca Indonesia sendiri. The Jakarta Post sendiri merubah

beberapa taktik pemberitaannya, dimulai awalnya dari membahas berita dan topik internasional di laman depan, hingga memfokuskan isu-isu Indonesia dalam sudut pandang jurnalisme ala Amerika mereka (Tarrant, 2008).

The Jakarta Post memasuki era 90-an dengan menjadi salah satu media yang memiliki reputasi cemerlang dan tanpa ragu menjadi media berbahasa Inggris terbaik dari kedua saingannya. The Jakarta Post menjadi media yang wajib dibaca oleh berbagai perusahaan diplomatik asing. Opini editorial yang dikeluarkan oleh The Jakarta Post sangat berpengaruh dan pemberitaan tentang hubungan internasional Indonesia dengan negara lain menjadi hal yang tak tertandingi di media di Indonesia. Tak diragukan bahwa The Jakarta Post memiliki peran penting dalam menjembatani isu-isu politik nasional kepada khalayak internasional. Hal ini menempatkan The Jakarta Post dalam posisi strategis sebagai penentu narasi politik Indonesia di mata dunia. Namun, peran ini juga membuka peluang bagi media tersebut untuk terlibat dalam dinamika politik domestik yang lebih kompleks. Sebagai media berbahasa Inggris, The Jakarta Post cenderung melayani pembaca kalangan atas, ekspatriat, dan pelaku bisnis, yang sering kali memiliki afiliasi erat dengan elite politik. Sebagai media yang memiliki kredibilitas internasional, The Jakarta Post sering menjadi rujukan bagi media asing untuk memahami dinamika politik Indonesia. Namun, hal ini juga berarti bahwa bias pemberitaannya dapat memperkuat stereotip atau agenda tertentu yang mendistorsi realitas politik. Dalam konteks dinasti politik, misalnya, The Jakarta Post mungkin memilih untuk

menyoroti aspek-aspek tertentu yang mendukung narasi progresif atau justru mengabaikan sisi-sisi yang lebih kritis terhadap elite penguasa.

Studi mengenai "Wacana Dinasti Politik dalam Media: Studi Kritis Pemilu 2024 Pada TheJakartaPost.com" menggunakan analisis wacana kritis karena pendekatan ini memberikan alat yang efektif untuk mengungkap dan memahami bagaimana dinasti politik dikonstruksi dan dipersepsikan dalam pemberitaan media. Analisis wacana kritis memungkinkan peneliti untuk menggali bagaimana wacana tentang dinasti politik dipresentasikan di media, seperti The Jakarta Post, dan bagaimana hal tersebut berkontribusi pada pembentukan legitimasi dan kekuasaan politik. Dengan fokus pada bagaimana wacana dibangun, disebarluaskan, dan diterima oleh publik, analisis wacana kritis dapat mengidentifikasi bagaimana narasi mengenai dinasti politik selama pemilu 2024 dipengaruhi oleh bias dan ideologi tertentu, serta bagaimana media membentuk pandangan masyarakat terhadap kekuasaan politik keluarga tertentu.

Selain itu, analisis wacana kritis sangat relevan untuk mengkaji konteks sosial politik dalam pemberitaan pemilu, khususnya dinasti politik. Penelitian ini dapat mengungkap bagaimana wacana media mempengaruhi persepsi publik tentang keadilan politik, kesempatan bagi kandidat baru, dan dampak terhadap demokrasi. Dengan menganalisis teks dan representasi media secara mendalam, Analisis wacana kritis dapat mengidentifikasi bagaimana dinasti politik diposisikan dalam konteks kekuasaan dan dominasi serta bagaimana suara-suara alternatif atau penentang wacana ini mungkin muncul. Dengan demikian, analisis wacana kritis

memberikan wawasan mendalam tentang dinamika kekuasaan yang terkandung dalam wacana politik yang disajikan oleh media seperti The Jakarta Post selama pemilu 2024.

Penelitian yang menggunakan teori hierarchy of influences dari Shoemaker dan Reese sangat relevan dan menarik ketika dikaitkan dengan isu dinasti politik, karena teori ini memungkinkan analisis mendalam terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi pemberitaan media (Shoemaker & Reese, 2016). Teori ini mempertimbangkan bias dan perspektif pribadi jurnalis yang dapat memengaruhi cara mereka meliput dan menafsirkan isu dinasti politik, mengingat latar belakang, pengalaman, dan keyakinan pribadi mereka. Selain itu, teori ini menyoroti bagaimana rutinitas dan proses editorial dalam organisasi media, seperti kebijakan redaksi dan tekanan deadline, membentuk cara isu dinasti politik dilaporkan. Struktur dan budaya organisasi media, termasuk kebijakan editorial dan tujuan bisnis, juga memainkan peran penting dalam mempengaruhi pemberitaan. Institusi sosial seperti pemerintah, partai politik, dan lembaga lainnya dapat memengaruhi independensi dan objektivitas media dalam melaporkan isu dinasti politik melalui tekanan atau intervensi tertentu. Lebih lanjut, sistem sosial dan norma-norma yang dominan dalam masyarakat juga mempengaruhi pemberitaan, di mana media dapat memperkuat atau menantang narasi dominan terkait dinasti politik. Dengan menggunakan teori hierarchy of influences, penelitian dapat mengidentifikasi dan menganalisis berbagai lapisan pengaruh yang membentuk pemberitaan tentang dinasti politik, memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang peran

media dalam membentuk persepsi publik terhadap fenomena ini. Dengan menggunakan wacana kritis, peneliti ingin mengkaji bagaimana wacana pemberitaan dinasti politik di Thejakartapost.com dalam konteks mikro, meso, serta makro.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah yang dapat diteliti adalah bagaimana TheJakartaPost.com mewacanakan isu dinasti politik dalam Pemilu 2024 melalui produksi teks, praktik wacana, serta konteks sosio kultural.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana TheJakartaPost.com mewacanakan isu dinasti politik pada Pemilu 2024 melalui produksi teks, praktik wacana, serta konteks sosio kultural.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana wacana berita dinasti politik dalam berita dan tajuk rencana di TheJakartaPost.com?
2. Bagaimana hirarki pengaruh mempengaruhi praktik wacana dinasti politik di TheJakartaPost.com?
3. Bagaimana konteks sosiokultural terbentuknya wacana dinasti politik di TheJakartaPost.com?
4. Bagaimana wacana dinasti politik di TheJakartaPost.com?

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan penelitian dalam beberapa aspek, yaitu kegunaan akademik, kegunaan praktis, dan kegunaan sosial.

1.5.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan akademik dalam membuat pespektif baru tentang wacana dan hirarki pengaruh dalam skala mikro, meso, dan makro pada media online berbahasa Inggris, di mana media memiliki agenda sendiri dalam konteks pbingkaian berita fenomena politik dan pemilu.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pelaku jurnalistik dalam memahami bagaimana hirarki pengaruh yang disengaja maupun tidak disengaja dalam media online berbahasa Inggris, khususnya dalam pbingkaian berita terkait fenomena politik dan pemilu.

1.5.3 Kegunaan Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran bagi pembaca untuk bersikap kritis terhadap konten media dan kesadaran akan adanya praktik-praktik ideologi yang tersembunyi dalam teks media dan hirarki pengaruh yang dilakukan media, khususnya berita-berita politik.